



2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

Tahun 2022



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Pagar Alam.**

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Dokumen Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat

Daerah sebagai Penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

RKPD Perubahan merupakan :

- a. dokumen perencanaan daerah Kota Pagar Alam untuk Perubahan APBD dan Perubahan PPAS; dan
- b. penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota Pagar Alam.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud RKPD Perubahan yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman penyusunan KUA perubahan APBD tahun anggaran 2022, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;

- (2) Tujuan penetapan RKPD Perubahan adalah untuk:
- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II ISI DAN URAIAN RKPD PERUBAHAN

Pasal 4

- (1) Isi adalah uraian dokumen RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan daerah
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) Isi dan Uraian Dokumen RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Perubahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 21 Juli 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM,



ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal, 21 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,



SAMSUL BAHRI BURLIAN
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022
NOMOR 25



KATA PENGANTAR

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2022 yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penyusunan APBD Kota Pagar Alam 2022. Guna mewujudkan Visi Kota Kota Pagar Alam yaitu **“Mewujudkan Pagar Alam Maju dengan konsep Kesejahteraan Masyarakat dan Keindahan Ekonomi serta Keadilan dalam Memperoleh Pendidikan”**.

Maka perlu dituangkan dalam rumusan Misi Kota Pagar Alam 2018-2023 yaitu :

1. Membangun ekonomi yang berkarakter, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Membangun area pasar tradisional berkonsep modern, demi terselenggaranya perputaran roda ekonomi yang baik;
3. Membangun pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan, dengan konsep perawatan lingkungan yang bersih dan sehat;
4. Membangun infrastruktur bidang kesehatan, pendidikan, budaya dan olahraga;
5. Membangun karakter orang tua dan anak untuk memahami pentingnya dunia pendidikan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Pagar Alam maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2022 telah disusun pada Tahun Anggaran 2021 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2022, Pemerintah Kota Pagar Alam memandang perlu untuk melakukan RKPD Perubahan Tahun 2022.

Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa RKPD Perubahan dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan



apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan lgbeegbuar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

RKPD Perubahan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Tahun 2022 yang akan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagar Alam. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPA-P Tahun 2022 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pagar Alam, 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

ALPIAN MASKONI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan	1-4
1.4 Sistematika Penulisan	1-5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022	II-1
2.1 Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	II-1
2.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2022	II-3
2.3 Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Pagalar Alam Tahun 2021	II-16
2.3.1 Bidang Urusan Pendidikan	II-16
2.3.2 Bidang Urusan Kesehatan	II-17
2.3.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-20
2.3.4 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	II-22
2.3.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-23
2.3.6 Bidang Urusan Sosial	II-25
2.4 Evaluasi RKPD Tahun 2022 terhadap 10 Prioritas Pembangunan Daerah	II-27
2.5 Permasalahan Pelaksana Kegiatan Triwulan II Tahun 2022	II-28
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2022	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-3
3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2022	III-4
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2022	III-8
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2022	III-10



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-4
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV-11
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-11
4.2.2 Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kota Pagar Alam	IV-12
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022	IV-17
4.2.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan Dan Nasional	IV-29
4.3 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	IV-44
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022	V-1
5.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2022	V-1
5.2 Pendanaan Program dan Kegiatan.....	V-8
BAB VI PENUTUP.....	VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Makro Triwulan II Tahun 2022	II-2
Tabel 2.2 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	II-3
Tabel 2.3 Rata-rata Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan pada setiap Program di Kota Pagar Alam Tahun 2022 Triwulan II	II-5
Tabel 2.4 Target Pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2021	II-16
Tabel 2.5 Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2021	II-17
Tabel 2.4 Target Pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2021	II-16
Tabel 2.5 Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2021	II-17
Tabel 2.4 Target Pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2021	II-16
Tabel 2.5 Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2021	II-17
Tabel 2.6 Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2021	II-18
Tabel 2.7 Realisasi Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2021	II-19
Tabel 2.8 Target Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam Tahun 2021	II-21
Tabel 2.9 Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam Tahun 2021	II-21
Tabel 2.10 Target Pencapaian SPM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alan Tahun 2021	II-22
Tabel 2.11 Realisasi Pencapaian SPM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alan Tahun 2021	II-23
Tabel 2.12 Target Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pagar Alan Tahun 2021	II-24



Tabel 2.13 Realisasi Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pagar Alan Tahun 2021.....	II-24
Tabel 2.14 Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Pagar Alan Tahun 2021	II-26
Tabel 2.15 Realisasi Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Pagar Alan Tahun 2021	II-26
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kota Pagar Alam Tahun 2021-2022...	III-3
Tabel 3.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 Kota Pagar Alam	III-7
Tabel 3.3 Target Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2022 Kota Pagar Alam.....	III-9
Tabel 3.4 Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2022 Kota Pagar Alam	III-11
Tabel 4.1 Proyeksi Indikator Kinerja Makro Kota Pagar Alam Tahun 2022.....	IV-6
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022	IV-7
Tabel 4.3 Penjabaran Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023 dalam Prioritas Daerah RKP Kota Pagar Alam Tahun 2022.....	IV-18
Tabel 4.4 Keselarasan Kebijakan RPJMD Kota Pagar Alam dan Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2022	IV-30
Tabel 4.5 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah RKP 2022 dengan Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2022	IV-31
Tabel 4.6 Alokasi Anggaran Prioritas Daerah RKP Kota Pagar Alam Tahun 2022	IV-39
Tabel 4.7 Pembagian Pola Tata Ruang Kawasan Kota Pagar Alam	IV-44
Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran Per OPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKP Perubahan Tahun 2022	V-3
Tabel 5.2 Rekapitulasi Anggaran Per Urusan/Bidang Urusan dalam RKP Perubahan Tahun 2022.....	V-5
Tabel 5.3 Struktur APBD Kota Pagar Alam dalam RKP Perubahan Tahun 2022.....	V-8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024	IV-4
Gambar 4.2 Pola Ruang Kota Pagar Alam.....	IV-44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022. RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022 tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam memandang perlu melakukan RKPD Perubahan Tahun 2022. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan RKPD Perubahan Tahun 2022, yaitu:

- a. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 dengan ditetapkannya RPJMD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.
- b. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2022.
- c. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
- d. Penambahan anggaran pendapatan serta hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 oleh BPK, yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan.



e. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

f. Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan RKPD Perubahan Tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RKPD Perubahan dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Proses penyusunan RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan rancangan RKPD Perubahan; b. perumusan rancangan akhir RKPD Perubahan; dan c. Penetapan, yang juga diusulkan melalui aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, dan memberi ruang bagi pokok-pokok pikiran DPRD.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang



- Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapatan Standar Pelayanan Minimal;



15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 01).
22. Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022 adalah memberikan arahan percepatan pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam mewujudkan sasaran pembangunan Tahun 2022. Adapun tujuan RKPD Perubahan Tahun 2022, yaitu:

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
2. Memberikan pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2022.



3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Akademisi dan Komunitas.
5. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang RKPD Perubahan Tahun 2022, landasan hukum pelaksanaan RKPD Perubahan Tahun 2022, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan RKPD Perubahan Tahun 2022, dan sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 pada Triwulan II, dan permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2022.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat telaahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Tahun 2022, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2022, serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD Tahun 2022 sampai dengan pertengahan tahun ini.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Kota Pagar Alam, serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022. Pada bagian ini dibahas juga keterkaitan pembangunan Kota Pagar Alam dengan pembangunan nasional. Selain itu pada bab ini disajikan juga arah kebijakan pembangunan kewilayahan.



BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat program dan kegiatan tahun 2022, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2022, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI. PENUTUP

Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022.



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2022.

Penyusunan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022 mengacu pada RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Kota Pagar Alam 2018-2023 serta mempedomani prioritas serta arah kebijakan provinsi dan nasional Tahun 2022.

Pada RPJMD Kota Pagar Alam 2018-2023 Visi Pemerintah Kota Pagar Alam adalah **“Mewujudkan Pagar Alam Maju dengan Konsep Kesejahteraan Masyarakat dan Keindahan Ekonomi serta Keadilan dalam memperoleh Pendidikan”**. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam lima misi, delapan tujuan dan dua belas sasaran pembangunan.

2.1. Capaian Indikator makro sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Indikator makro merupakan indikator kinerja utama Walikota yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan visi dan misi tersebut diukur dari pencapaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator makro pembangunan Kota Pagar Alam sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 menggambarkan kinerja aspek pembangunan manusia yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.1
Target dan Realisasi Indikator Makro Triwulan II Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022 (RPJMD)	Target 2022 (RKPD)	Realisasi 2021	CAPAIAN 2022 (TW II)
1	Pertumbuhan Ekonomi	5.38	5.38	4.39	4.39
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.42	2.42	1.64	1.64
3	Angka Kemiskinan	8.74	8.74	9.4	9.4
4	Indeks Pembangunan Manusia	70.23	70.23	68.68	68.68
5	Gini Ratio	0.316	0.316	0.328	0.328

Sumber: RPJMD, RKPD 2022 dan BPS Kota Pagar Alam Tahun 2022

Berdasarkan data BPS kinerja perekonomian Kota Pagar Alam pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang didukung oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 23,24 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,79 persen, konstruksi sebesar 16,22 persen, jasa Pendidikan 10,04 persen real estate sebesar 54,64 persen serta sektor-sektor lainnya.

Menurut BPS Dari ke empat komponen IPM maka dimensi ekonomi yaitu pengeluaran per kapita sebesar Rp. 8,877 juta ditahun 2021. Komponen ini yang paling mempengaruhi terhadap penurunan angka IPM dibandingkan dengan komponen lainnya yang tidak banyak berubah. komponen IPM yang perlu mendapatkan perlakuan khusus agar meningkatkan nilai IPM secara significant adalah komponen dari aspek ekonomi yaitu pengeluaran perkapita. Dalam hal ini merangsang tingkat konsumsi masyarakat yang tentunya harus diiringi dengan pendapatan yang meningkat juga. Pola masyarakat dengan pendapatan tahunan dari kebun kopi membuat pola konsumsi sedikit ditahan untuk mencukupkan kebutuhan dalam setahun. Ketika terdapat diservikasi pendapatan yang tidak mengandalkan hasil tahunan maka pola kosumsi juga berubah, hal ini yang akan meningkatkan pengeluaran per kapita dan kemudian mendongkrak nilai IPM.

Sebagai salah satu variabel penting pembangunan daerah, angka kemiskinan idealnya terus menurun. Namun ditahun 2021 angka kemiskinan Kota Pagar Alam mengalami kenaikan hingga mencapai 9,4 persen, meskipun angka kemiskinan Kota Pagar Alam terdendah di prrovinsi Sumatera Selatan hal ini menunjukkan bahwa



masyarakat Kota Pagar Alam diambang kemiskinan.

Hal ini perlu fokus perhatian yang serius pemerintah untuk melihat variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi naiknya angka kemiskinan ini.

Perlu kajian lebih dalam agar pengentasan kemiskinan dapat berjalan sesuai dengan target pembangunan kota. Selain pertumbuhan ekonomi yang di wakili dengan angka PDRB, variabel-variabel yang ikut mempengaruhi angka kemiskinan yaitu pengangguran, pendidikan, upah minimum. Hal tersebut patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan karena pengaruhnya yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan.

2.2. Capaian Program dan Kegiatan Pada Triwulan II Tahun 2022

APBD Kota Pagar Alam tahun 2022 terdiri dari 168 program dan 468 kegiatan dan 1.476 Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 32 Perangkat Daerah. Tingkat capaian kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah
Triwulan II Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	61,63	42,72
2	DINAS KESEHATAN	13,41	13,97
3	RSUD BESEMAH	51,02	51,75
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16,36	21,57
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12,10	10,79
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	53,71	38,68
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	49,44	42,3
8	DINAS SOSIAL	10,88	22,76
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	11,64	11,64
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	42,20	34,65



NO	SATUAN KERJA	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	58,83	59,19
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	26,11	17,43
13	DINAS PERHUBUNGAN	34,07	30,22
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	55,86	23,12
15	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	29,57	32,78
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	31,51	31,51
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,10	64,64
18	DINAS PARIWISATA	23,50	21
19	DINAS PERTANIAN	31,07	18,24
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	47,81	44,03
21	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	40,42	40,84
22	SEKRETARIAT DPRD	56,75	42,72
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	49,31	46,39
24	BADAN KEUANGAN DAERAH	33,20	39,15
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	43,71	51,63
26	INSPEKTORAT DAERAH	44,29	41,23
27	KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN	56,66	61,17
28	KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA	62,66	72,93
29	KECAMATAN DEMPO UTARA	83,66	59,74
30	KECAMATAN DEMPO TENGAH	32,65	50,58
31	KECAMATAN DEMPO SELATAN	32,64	48,64
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	39,01	22,25
	JUMLAH	38,68	37,82

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2022



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi kinerja SKPD adalah sebesar 38,68% dan rata-rata realisasi anggaran SKPD sebesar 37,82%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi RKPD Tahun 2022 selain melakukan evaluasi kinerja, dilakukan juga evaluasi berupa penelaahan terhadap kesesuaian kegiatan dengan output dan target.

Rekapitulasi rata-rata realisasi kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan pada semua program perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Rata-Rata Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan pada Setiap Program di Kota Pagar Alam Tahun 2022 Triwulan II

No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49,88	36,70
	Program Pengelolaan Pendidikan	35,29	29,75
	Program Pengembangan Kurikulum	100,00	86,16
	Program Pengembangan Kebudayaan	84,56	24,64
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	38,43	36,34
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	61,63	42,72
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	152.423.859.090	
2	DINAS KESEHATAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,63	39,84
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5,65	3,50
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Kesehatan	24,78	23,20
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman	0,00	3,31
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,00	0,00
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	13,41	13,97
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	67.214.538.377	



No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44,93	44,93
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	57,12	58,57
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	51,02	51,75
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	86.219.044.101	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40,82	39,45
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	2,75	24,60
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,37	1,27
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0,00	1,03
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0,00	0,00
	Program Pengembangan Permukiman	0,00	1,22
	Program Penataan Bangunan Gedung	6,59	6,30
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	99,49	97,68
	Program Penyelenggaraan Jalan	6,90	6,82
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5,70	37,35
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	16,36	21,57
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	78.882.597.305	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	47,38	37,36
	Program Pengembangan Perumahan	0,00	0,00
	Program Kawasan Permukiman	20,42	16,23
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum(Psu)	0,00	0,00
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	0,00	0,00
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	13,31	12,27



No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	15,68	9,66
	Program Penatagunaan Tanah	0,00	0,00
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	12,10	10,79
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	33.654.517.053	
6	SATPOL PP		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41,87	41,87
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	65,54	35,48
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	53,71	38,68
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	83.393.591.463	
7	DINAS SOSIAL		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,13	38,48
	Program Pemberdayaan Sosial	20,00	48,22
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	0,00	0,00
	Program Penanganan Bencana	0,00	0,00
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	14,29	27,11
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	10,88	22,76
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	4.110.276.158	
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	34,24	37,39
	Program Perlindungan Perempuan	4,87	4,90
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	45,13	17,54
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	20,47	25,11
	Program Perlindungan Khusus Anak	0,00	0,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54,95	46,38



No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
	Bidang Pengendalian Penduduk	0,00	0,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	36,59	11,64
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatn Keluarga Sejahtera (Ks)	12,63	13,91
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	26,11	17,43
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	8.900.649.553	
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41,48	41,48
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6,89	6,89
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0,00	0,00
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7,08	7,08
	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2,75	2,75
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	11,64	11,64
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	7.917.527.244	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40,78	39,71
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	53,17	57,40
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	0,00	0,00
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	11,11	4,87
	Program Pengelolaan Persampahan	5,94	5,91
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	42,20	34,65
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	9.158.396.485	



No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	51,67	41,56
	Program Pendaftaran Penduduk	49,69	51,59
	Program Pencatatan Sipil	55,13	74,55
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	78,81	69,06
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	58,83	59,19
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	3.012.199.282	
12	DINAS PERHUBUNGAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45,59	44,03
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	22,54	16,42
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	34,07	30,22
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	9.924.746.736	
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49,01	32,27
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	43,89	28,19
	Program Aplikasi Informatika	46,46	5,29
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	93,64	49,85
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	46,30	0,00
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	55,86	23,12
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	4.971.499.318	
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM		
	Prog. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	47,65	41,54
	Prog. Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	0,00	0,00
	Prog. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	100,00	100,00



No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
	Prog. Pengembangan UMKM	46,43	42,17
	Prog. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	63,84	58,69
	Prog. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	30,00	15,90
	Prog. Pengembangan Ekspor	68,83	68,83
	Prog. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	50,65	49,38
	Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	22,86	19,72
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	47,81	44,03
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	6.999.483.534	
15	DINAS PARIWISATA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49,91	44,41
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	17,90	20,30
	Program Pemasaran Pariwisata	21,99	12,88
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	20,58	20,56
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	7,09	6,85
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	23,50	21,00
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	7.348.752.707	
16	DINAS PERTANIAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	47,43	39,28
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	14,71	2,00
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0,00	0,00
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	0,00
	Program Penyuluhan Pertanian	0,00	49,92
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	31,07	18,24
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	20.339.280.216	



No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,30	46,31
	Program Pembinaan Perpustakaan	-	32,13
	Program Pengelolaan Arsip	-	115,47
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	2,10	64,64
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	3.164.285.790	
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35,55	35,56
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	9,21	9,21
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	41,29	41,29
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	40,00	40,00
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	31,51	31,51
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	5.277.478.965	
19	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52,87	47,96
	Program Pelayanan Penanaman Modal	16,67	30,36
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	19,18	20,03
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	29,57	32,78
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	6.113.208.638	
20	SEKRETARIAT DAERAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37,53	37,52
	Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	55,77	57,03
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	27,95	27,96
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	40,42	40,84
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	41.154.041.284	



No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
21	SEKRETARIAT DPRD		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50,46	45,87
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	63,05	39,57
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	56,75	42,72
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	53.560.128.376	
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48,96	43,47
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	62,03	58,00
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	45,17	44,21
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	41,08	39,85
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	49,31	46,39
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	10.616.184.028	
23	BADAN KEUANGAN DAERAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42,01	41,49
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10,62	12,00
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	27,05	40,67
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	53,11	62,44
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	33,20	39,15
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	71.251.286.379	
24	BKPSDM		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31,81	31,98
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	55,61	71,29
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	43,71	51,63
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	12.538.243.787	



No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48,88	44,78
	Program Penanggulangan Bencana		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	50,00	39,82
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	49,44	42,30
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	4.364.642.992	
26	INSPEKTORAT		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	47,25	48,67
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	47,41	38,26
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asestensi	38,20	36,76
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	44,29	41,23
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	5.927.040.591	
27	KEC. PAGAR ALAM UTARA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29,58	41,02
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	55,05	79,44
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28,65	44,22
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	62,66	72,93
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	8.633.870.100	
28	KEC. PAGAR ALAM SELATAN		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32,11	40,42



No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79,17	66,65
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN	100,00	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	15,38	37,61
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	56,66	61,17
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	7.143.027.354	
29	KEC.DEMPO UTARA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	154,64	63,72
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100,00	100,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	40,00	37,61
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40,00	37,61
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	83,66	59,74
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	5.501.995.022	
30	KECAMATAN DEMPO TENGAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.25	67.55
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0,00	0,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	43.94	90.22
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.77	44.56
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	32.65	50.58
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	8.633.870.100	
31	DEMPO SELATAN		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52,78	33,55



No	Program	Triwulan II	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	29,82	38,08
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	22,97	85,34
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	25,00	37,59
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	32,64	48,64
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	3.875.671.764	
32	KESBANGPOL		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48,10	43,10
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	48,12	39,06%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,55	1,89%
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	37,23	37,23
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	80,66	35,36
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik	17,41	17,41
	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pada Seluruh Program	39,01	22,25
	Jumlah Anggaran dari Seluruh Program	3.930.125.684	

Sumber: *Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah di Kota Pagar Alam Tahun 2022 Triwulan II Tahun 2022*

Berdasarkan hasil rekapitulasi data diatas, rata-rata realisasi kinerja triwulan II Perangkat Daerah adalah 38,68% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 37,82%, terdapat 13 Program yang capaiannya berada dibawah rata-rata bahkan capaian kinerja masih nol. Hal ini dikarenakan pada triwulan II program dan kegiatan yang dilaksanakan masih dalam tahap persiapan pelaksanaan.



2.3 Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Pagar Alam Tahun 2021

2.3.1 Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pendidikan di Kota Pagar Alam yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : a. Pendidikan anak usia dini; b. Pendidikan dasar; dan c. Pendidikan kesetaraan.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Pendidikan antara lain : a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah; b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus; c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini; d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Tabel 2.4
Target Pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pagar Alam Tahun 2021

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN DASAR	100%	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PENDIDIKAN KESETARAAN	100%	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	100%	2021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagalar Alam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pagalar Alam Tahun 2021

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDIDIKAN DASAR				
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	23.649	100%	23.875	99,05
2	PENDIDIKAN KESETARAAN				
	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	83	100%	83	100
3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				
	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4.514	100%	5.25	85,98

2.3.2 Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut : a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir d. Pelayanan Kesehatan Balita e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV.



2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja Pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 2.6
Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2021

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95,17	2021	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	97,97	2021	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	102,81	2021	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	98,48	2021	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	96,48	2021	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7,40	2021	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13,34	2021	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	13,18	2021	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14,94	2021	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	74,74	2021	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	40,30	2021	Dinas Kesehatan



No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	13,76	2021	Dinas Kesehatan

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Kota Pagalar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kota Pagalar Tahun 2021

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	2	3	4	5	6
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2.799	2.941	95,17
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2.75	2.807	97,97
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2.748	2.673	102,81
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	13.821	14.035	98,48
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	12.59	13.05	96,48
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	7.066	95.467	7,40
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				



No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2.549	19.112	13,34
8	PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HYPERTENSI				
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	4.833	36.678	13,18
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS				
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	1.855	12.42	14,94
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT				
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	219	293	74,74
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB				
	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	243	603	40,30
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)				
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	514	3.736	13,76

2.3.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagalar Alam yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : a. pemenuhan



kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

Tabel 2.8
Target Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pagar Alam Tahun 2021

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air Minum Sehari-hari	69.31%	2021	Dinas PUPR
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	51.98%	2021	Dinas PUPR

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pagar Alam Tahun 2021

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	2	3	4	5	6
1	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI- HARI	51.08	51.08	61.53	120,46
	Jumlah Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	146,128	146,128	89.911	89.911
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	100	100	50.71	64,19
	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	146128	146128	73,963	73,963



2.3.4 Bidang Urusan Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanian

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanian Kota Pagar Alam yang secara teknis dilaksanakan oleh Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanian memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Pagar Alam; dan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Pagar Alam.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanian antara lain : a. korban bencana Kota Pagar Alam yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kota Pagar Alam; b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Pagar Alam; c. korban bencana Kota Pagar Alam yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kota Pagar Alam; dan d. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Pagar Alam untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Pagar Alam.

Tabel 2.10
Target Pencapaian SPM Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanian
Kota Pagar Alam Tahun 2021

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana di Kota Pagar Alam.	0%	2021	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanian



No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Pagar Alam.	0%	2021	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun 2021

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	2	3	4	5	6
1	PENYEDIAAN & REHABIITASI RUMAH YG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DI KOTA PAGAR ALAM.				
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	100%	0	0%
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.				

2.3.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pagar Alam yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; b. pelayanan informasi rawan bencana; c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.



2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

Tabel 2.12
Target Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pagar Alam Tahun 2021

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	100%	2021	SAT POL PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pagar Alam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Realisasi Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Pagar Alam Tahun 2021

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	2	3	4	5	6
1	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	2 Perda	100%	2 Perda	100%



No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	2	3	4	5	6
2	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2500 Orang	2000 Orang	2000 Orang	80%
3	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2500 Orang	2000 Orang	2000 Orang	80%
4	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	100%
5	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	100%

2.3.6 Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang Sosial Kota Pagar Alam yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Sosial memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti; 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Kota Pagar Alam.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Sosial antara lain :



Tabel 2.14
Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2021

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Perangkat Daerah
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100	2021	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi anak terlantar di luar panti	100	2021	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100	2021	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	2021	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana di Kota Pagar Alam	100	2021	Dinas Sosial

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Sosial Kota Pagar Alam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2021

No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	2	3	4	5	6
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI LUAR PANTI				
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	26 orang	26 orang	26 orang	100



No	Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	2	3	4	5	6
2	REHABILITASI ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI				
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	28 orang	28 orang	28 orang	100
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI				
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	12 orang	12 orang	12 orang	100
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI				
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	15 orang	15 orang	15 orang	100
5	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP & PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DI KOTA PAGAR ALAM				
	Jumlah Warga Negara korban bencana di Kota Pagalar Alam yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	10 orang	10 orang	10 orang	100

2.4 Evaluasi RKPD Tahun 2022 Terhadap 10 Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2022 yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan Akses Serta Pelayanan Kesehatan; 2) Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Pertanian dan Perikanan; 3) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 4) Peningkatan Iklim Investasi di Sektor Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal; 5) Infrastruktur dan Konektivitas; 6) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; 7) Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan KAMTIBMAS.

Adapun RPJMD Kota Pagalar Alam Tahun 2018-2023 telah menetapkan 10 Prioritas Pembangunan Daerah yaitu: (1) Pengembangan industri unggulan; (2)



Perluasan pasar dan perbaikan manajemen ekonomi kerakyatan; (3) Pengembangan perekonomian, koperasi dan UKM berbasis pariwisata; (4) Kebudayaan yang berkearifan lokal; (5) Pemerataan Kualitas pendidikan; (6) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan; (7) Pertumbuhan, pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan; (8) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan; (9) Peningkatan pelayanan publik menuju good governance; (10) Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada RPJMD Tahun 2018-2023, Program yang disusun untuk mewujudkan Pagalar Alam Maju, namun belum semua Program Pagalar Alam Maju terakomodasi pada RKPD Tahun 2022, sehingga diperlukan penyesuaian pada beberapa program pembangunan.

2.5 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2022

Permasalahan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas aparatur dalam hal manajemen administrasi keuangan.
2. Sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai.
3. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalamiketerlambatan.
4. Beberapa Program belum didukung oleh kegiatan pada RKPD Tahun 2022.
5. Terdapat banyak kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 yang output dan target tidak berkesesuaian.
6. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran.
7. Adanya penyesuaian kode rekening belanja
8. Adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Peningkatan kapasitas aparatur teknis pelaksana kegiatan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan administrasi perkantoran yang belum memadai.



3. Penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu tindaklanjut terhadap kendala teknis yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi.
5. Penyesuaian output dan target pada kegiatan RKPD Tahun 2022 yang tidak berkesesuaian.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam RKPD Perubahan Tahun 2022. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2022.

3.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023. Guna mengukur kemajuan pembangunan digunakan beberapa indikator makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan gini ratio.

Nilai PDRB Pagar Alam atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 3,01 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sebesar 0,18 triliun rupiah bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 2,83 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,10 triliun rupiah. Dari 2,23 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 2,33 triliun pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Pagar Alam mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,39 persen. Terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya tumbuh sebesar 0,02 persen.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Pagar Alam masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Jasa Pendidikan; dan Real Estat. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Pagar Alam.



Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Pagar Alam pada tahun 2021 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dihasilkan oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 23,24 persen. Pada tahun 2021 ini peranan sektor ini bahkan mengalami kenaikan setelah selama kurun 10 tahun terakhir trennya menunjukkan penurunan.

Peranan kedua masih disumbang dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 19,79 persen. Lapangan usaha Konstruksi menyumbang sebesar 16,22 persen, disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,04 persen dan lapangan usaha Real Estat sebesar 5,64 persen. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Pemerintah Kota Pagar Alam terus berupaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta melakukan akselerasi pencapaian target-target indikator kinerja daerah yang belum terpenuhi berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2022.

Kondisi ketenagakerjaan Kota Pagar Alam yang lebih baik dari tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 2,50% di tahun 2020 menjadi 1,64% di tahun 2021. Produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan meskipun peningkatannya banyak tertumpu di sektor pertanian. Di era milenial saat ini, Pemerintah harus bisa menyediakan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan kompeten untuk meningkatkan nilai tambah di berbagai sektor, terlebih saat ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana tenaga mesin mulai menggantikan tenaga manusia.

Sektor pendidikan menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Data BPS secara nasional menunjukkan, besaran nilai upah menurut jenjang pendidikan mengalami peningkatan seiring meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Oleh karena itu, Pemerintah dan semua komponen masyarakat harus bersinergi untuk menumbuhkan kesadaran kepada calon tenaga kerja di Kota Pagar Alam bahwa menuntut ilmu itu sangat diperlukan karena berdampak pada jenis, upah dan lapangan pekerjaan dimasa yang akan datang. Selain itu, pengawasan juga harus dilakukan terhadap pemberi kerja untuk memastikan upah yang diberikan sudah



sesuai dengan UMP yang telah diputuskan oleh Pemerintah. Dengan demikian, kualitas pekerja dan produktivitas pekerja di Kota Pagar Alam dapat ditingkatkan.

Membbaiknya kondisi ketenagakerjaan diharapkan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam. Penurunan angka kemiskinan tetap menjadi sasaran utama Pemerintah Kota Pagar Alam meskipun di tahun 2021 sempat mengalami kenaikan menjadi 9,4 persen, namun angka kemiskinan Kota Pagar Alam tetap terendah di Provinsi Sumatera Selatan, diikuti membaiknya ketimpangan pendapatan. Indeks Gini diduga akan terus menurun hingga tidak lebih dari 0,3. Hal lain yang harus menjadi perhatian dalam RKPD Perubahan Tahun 2022 adalah dukungan sektor potensial yakni pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang seharusnya menjadi dasar perubahan. Upaya penanganan masalah tersebut didukung salah satunya dengan kondisi meningkatnya realisasi Investasi PMTB/adhb yang secara tidak langsung meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada RKPD Perubahan Tahun 2022 Kota Pagar Alam menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,38 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,42 persen, Angka Kemiskinan sebesar 8,74 persen, Indek Pembangunan Manusia sebesar 70,23 poin dan Gini Rasio sebesar 0,316 poin. Tabel realisasi dan proyeksi pembangunan ekonommi Kota Pagar Alam tahun 2021-2022 pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kota Pagar Alam Tahun 2021-2022

No	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET RKPD 2022	CAPAIAN 2022 (TW II)	TARGET PERUBAHAN RKPD 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	4.39	5.38	4.39	5.38
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.64	2.42	1.64	2.42
3	Angka Kemiskinan	9.4	8.74	9.4	8.74
4	Indeks Pembangunan Manusia	68.68	70.23	68.68	70.23
5	Gini Ratio	0.328	0.316	0.328	0.316

Sumber: BPS, 2022

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa RKPD Perubahan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil



evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kota Pagar Alam sehingga RKPD Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada RKPD Perubahan Tahun 2022 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1. Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2022

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam untuk Perubahan Anggaran Tahun 2022, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusidaerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
5. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan
6. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya



dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Sedangkan untuk meningkatkan dana perimbangan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, dan PPh badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; serta
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan.

Dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
 - e. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - f. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
 - g. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.



2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 - c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:
 - a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah;
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan Tahun 2022 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 3.2
TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 KOTA PAGAR ALAM

NO	Uraian	Proyeksi/Target		
		RKPD Tahun 2022	APBD 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022
4.1	Pendapatan asli daerah	55,902,297,500	51,896,297,500	59,568,779,587
4.1.01	Pajak daerah	8,592,500,000	8,592,500,000	8,903,000,000
4.1.02	Retribusi daerah	4,398,397,500	4,398,397,500	4,408,897,500
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5,880,000,000	5,880,000,000	7,295,652,639
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	37,031,400,000	33,025,400,000	38,961,229,448
4.2	Pendapatan Transfer	689,560,896,996	669,162,537,528	761,732,985,209
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637,559,955,468	617,161,596,000	649,503,756,156
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar daerah	52,000,941,528	52,000,941,528	112,229,229,053
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	20,572,860,000	4,006,000,000	4,006,000,000
4.3.01	Bagi hasil pajak dari dan dari pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20,572,860,000	4,006,000,000	4,006,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	766,036,054,496	725,064,835,028	825,307,764,796

Sumber: Bappeda Kota Pagalar Alam, 2022 (diolah kembali)



3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2022

Adapun Kebijakan Belanja Daerah Kota Pagar Alam untuk RKPD Perubahan Tahun Anggaran Tahun 2022 tetap diarahkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 17 (tujuh belas) urusan dan pilihan sejumlah 5 (lima) urusan serta fungsi penunjang urusan sejumlah 15 (lima belas) urusan;
2. Pendukungan terhadap program *Sustainable Development Goals (SDGs)*;
3. Pendukungan terhadap RKP 2022;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kota Pagar Alam. Rincian perhitungan fungsi kesehatan yaitu 10% dari total belanja APBD di luar gaji, dan pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
6. Penyelenggaraan Bantuan keuangan seperti hibah, Bansos dan subsidi;
7. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat dan Pajak Rokok;
8. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;



Tabel 3.3
TARGET BELANJA DAERAH PADA PERUBAHAN TAHUN 2022
KOTA PAGAR ALAM

NO	Uraian	Proyeksi/Target		
		RKPD Tahun 2022	APBD 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022
5.1	Belanja Operasi	640.076.178.364	578,329,242,605	650,206,670,318
5.1.01	Belanja pegawai	339.554.921.241	324,590,711,570	325,049,955,459
5.1.02	Belanja barang dan jasa	295.174.128.699	244,923,750,561	312,224,286,898
5.1.04	Belanja subsidi	1.500.000.000	500,000,000	1,200,000,000
5.1.05	Belanja hibah	3.470.503.424	8,314,780,474	11,632,427,961
5.1.06	Belanja bantuan sosial	376.625.000	0,00	100,000,000
5.2	Belanja Modal	134.607.249.341	148,697,234,771	298,916,524,083
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.456.511.569	42,630,011,307	44,709,038,357
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.093.749.746	33,400,878,453	50,616,351,731
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.168.662.094	67,307,895,511	199,510,421,895
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.688.325.932	3,758,449,500	4,080,712,100
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.200.000.000	1,600,000,000	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.011.500.000	29,650,000,000	4,650,000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.011.500.000	29,650,000,000	4,650,000,000
	TOTAL JUMLAH BELANJA	779.694.927.705	756,676,477,376	953,773,194,401

Sumber: Sumber : <https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/>



3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2022

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2021 hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Pada RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022, SiLPA Tahun Anggaran 2021 yang bisa digunakan adalah sebesar Rp. 112,078,572,760.

Adapun kerangka pendanaan RKPD Perubahan Tahun 2022 di sajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.4
TARGET PEMBIAYAAN DAERAH PADA PERUBAHAN TAHUN 2022
KOTA PAGAR ALAM

NO	Uraian	Proyeksi/Target		
		RKPD Tahun 2022	APBD 2022	RKPD Perubahan Tahun 2022
6.1	Penerimaan Pembiayaan	13.658.873.209	31,611,642,348	112,078,572,760
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	13.658.873.209	31,611,642,348	112,078,572,760
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.658.873.209	31,611,642,348	112,078,572,760
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	1,000,000,000
6.2.01	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0,00	0,00	1,000,000,000
6.2.03	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	1,000,000,000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	13.658.873.209	31,611,642,348	111,078,572,760

Sumber: Sumber : <https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/>



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022 diarahkan untuk mendorong PAD dari sektor pasar tradisional dan ekonomi kreatif, meningkatkan kesejahteraan rakyat dari kelurahan hingga kota, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang fokus.

Penyusunan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022 berpedoman terhadap RPJPD Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 serta arah kebijakan provinsi dan nasional. Untuk keselarasan dengan pembangunan nasional, maka arah pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022 juga memperhatikan arah pembangunan nasional.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

RPJMN Tahun 2020-2024 memuat 7 (Tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1 : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- 2 : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3 : Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5 : Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar;
- 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 7 : Stabilitas polikumulatif dan transformasi pelayanan publik;

Sasaran pokok dari 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, meliputi:



- a. Yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:
 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,
 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

- b. Sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 akan dicapai melalui lima (5) prioritas, yaitu: pengembangan kawasan strategis; pengembangan sektor unggulan; pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah.

- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing melalui :
 1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
 2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 3. Terpenuhnya Layanan Dasar
 4. Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan
 5. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing

- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui :
 1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
 2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
 3. Meningkatnya Kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
 4. Menguatnya moderasi bergama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
 5. Meningkatnya Ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
 6. Meningkatnya budaya literasi untuk mejudkan mayarakat berpengathuan, inovatif dan kreatif



- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar melalui :
1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
 2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah
 3. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
 4. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, abdak dan efisien
 5. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Outcome untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 3. Pembangunan Rendah Karbon
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, ditetapkan Sasaran, Target, dan Indikator sebagai berikut:
1. Konsolidasi Demokrasi
 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 3. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Adapun gambaran strategi tersebut disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional 2020-2024

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Kota Pagalar Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Kota Pagalar Tahun 2018- 2023. Penyusunan RKPDP 2022 mempedomani sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pagalar Tahun 2005-2025.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 maka pembangunan Kota Pagalar Tahun 2022 mempedomani RPJMD tersebut. Memasuki pertengahan Tahun 2022 ini, pembangunan Kota Pagalar juga diarahkan untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023 pada tahun ketiga.

Pembangunan jangka menengah Kota Pagalar diarahkan untuk mencapai visi RPJMD Kota Pagalar Tahun 2018-2023, yakni:

“MEWUJUDKAN PAGAR ALAM MAJU DENGAN KONSEP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEINDAHAN EKONOMI SERTA KEADILAN DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN”



Pernyataan visi Kota Pagar Alam 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Pernyataan visi Kota Pagar Alam tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:

1. SEJAHTERA : Pembangunan Lima Tahun mendatang diharapkan mampu menciptakan potensi ekonomi dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
2. KEINDAHAN EKONOMI : Pembangunan Lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat kecil.
3. KEADILAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN : Pembangunan Lima Tahun mendatang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dibidang pendidikan, sehingga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi namun mempunyai prestasi akademik dapat melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya yang lebih tinggi.

Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. Membangun Ekonomi yang Berkarakter, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Membangun area pasar tradisional berkonsep modern, demi terselenggaranya perputaran roda ekonomi yang baik.
3. Membangun pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan, dengan konsep perawatan lingkungan yang bersih dan sehat.
4. Membangun Infrastruktur bidang kesehatan, pendidikan, budaya dan olah raga.
5. Membangun karakter Orang Tua dan Anak untuk memahami pentingnya dunia pendidikan.

Kelima misi RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018–2023 dijabarkan kedalam 8 (delapan) Tujuan dan 12 (sebelas) Sasaran Pembangunan Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, dengan sasaran 1) meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri, 2) meningkatkan ketahanan pangan, 3) menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatkan aksesibilitas perdagangan, dengan sasaran meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan;



3. Mewujudkan masyarakat yang sehat , dengan sasaran meningkatnya cakupan perlindungan dan layanan kesehatan masyarakat;
4. Mewujudkan lingkungan hidup bersih dan lestari, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan dari kelurahan hingga perkotaan, dengan sasaran 1) meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur, 2) meningkatnya kinerja perhubungan dan penerapan teknologi informasi;
6. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan wisata dan budaya berbasis kearifan lokal, dengan sasaran 1) terlestarikannya Budaya Lokal, 2) meningkatnya Intensitas Pariwisata;
7. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, dengan sasaran meningkatnya cakupan layanan pendidikan;
8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan sasaran meniadakannya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelaksanaan tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan yang berfungsi sebagai tolok ukur penilaian. Rincian indikator kinerja tujuan, sasaran, kondisi capaian tahun lalu dan target tahun 2021 disajikan pada Tabel 4.2. Selain indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, ditetapkan juga beberapa indicator kinerja makro pembangunan Kota Pagalar Alam, sebagaimana dimuat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Proyeksi Indikator Kinerja Makro Kota Pagalar Alam Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian		Proyeksi
			2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.02	4.39	5.38
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.50	1.64	2.42
3.	Angka Kemiskinan	Persen	9.07	9.4	8.74
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68.31	68.68	70.23
5.	Gini Ratio	Poin	0.343	0.328	0.316

Sumber: RPJMD Kota Pagalar Alam Tahun 2018-2023



Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Kinerja		
						Capaian		Target
						2020	2021	2022
1	Membangun Ekonomi yang Berkarakter guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri	Produktivitas tanaman perkebunan kopi (ton/Ha)	Ton/Ha	2,70	2,73	2,74
				Rata-rata Produktivitas tanaman Hortikultura (ton/Ha)	Ton/Ha	11,65	10,12	10,22
				Produksi perikanan (%)	%	83,87	89	95
				Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	19,58	19,51	19,52
				Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	1,77	1,67	1,68
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama (%)	%	111,84	168	176
			Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Investasi	%	463,05	27	2
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,5	2,5	2,42
				Angka Kemiskinan	%	9,07	8,82	8,74



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Kinerja		
						Capaian		Target
						2020	2021	2022
2	Membangun area Pasar Tradisional Berkonsep Modern demi terselenggara-nya perputaran roda ekonomi yang baik.	Meningkatkan aksesibilitas perdagangan	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	Rasio jumlah pasar per 10.000 penduduk	Per 10.000 Penduduk	0,57	0,64	0,70
3	Membangun pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan dengan Konsep Perawatan Lingkungan yang bersih dan sehat	Mewujudkan masyarakat yang sehat	Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,71	66,8	67
				Indeks Kualitas Udara	IKU	91.611	88.71	88.82
				Indeks Kualitas air	IKA	70	67.05	67.15
				Indek Tutupan Lahan	IKLH	65.149	47.32	49.52
4	Membangun Infrastruktur bidang kesehatan, pendidikan, budaya dan olah raga	Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan dari kelurahan hingga perkotaan	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	57,10	60,94	62,37
				Persentase akses penduduk terhadap sanitasi yang layak	%	44,39	68,79	75,19



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Kinerja		
						Capaian		Target
						2020	2021	2022
				Persentase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	%	0	0,153	0,116
				Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	%	69,31	60,66	69,97
				Kawasan Olah Raga yang dibangun	Kawasan	0,20	0,6	0,8
				Kawasan budaya yang dikembangkan	Kawasan	0	0	1
			Meningkatnya kinerja perhubungan dan penerapan teknologi informasi	Indeks Konektivitas	Nilai	1	1	1
				Cakupan Layanan Telekomunikasi (Coverage)	%	80	80	85
			Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Wisata dan Budaya berbasis kearifan lokal	Terlestarikannya Budaya Lokal	Buah	1	2	2
				Meningkatnya Intensitas Pariwisata	Orang	275.117	302.628	332.890
5	Membangun karakter orang tua dan anak	Mewujudkan Masyarakat yang	Meningkatnya Kualitas	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.39	9.10	9.17



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Kinerja		
						Capaian		Target
						2020	2021	2022
	untuk memahami Pentingnya Dunia Pendidikan	Cerdas	Pendidikan)	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.85	13.1	13.14
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	CC	CC
				Opini Pengelolaan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP
				Kategori Nilai Sakip	Nilai	B	BB	BB
				Persentase IKM OPD dalam Katagori Baik	%	80.1	87	87

Sumber: RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023



4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 major project yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN serta masyarakat/badan usaha. Selain itu Major Project memenuhi kaidah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely).

Prioritas Pembangunan Nasional dalam 41 major project yang direncanakan sebagai program startegis nasional 2020-2024 yaitu sebagai berikut :

1. 10 Destinasi wisata prioritas (Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka-Belitung, Morotai).
2. 9 Kawasan industri luar Jawa dan 31 Smelter.
3. Penguatan jaminan usaha dan 350 korporasi petani-nelayan.
4. Industri 4.0 di lima subsektor prioritas.
5. Pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit.
6. Revitalisasi tambak di sentra produksi Udang dan Bandeng.
7. Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional.
8. Pembangunan wilayah Batam-Bintan
9. Pengembangan wilayah metropolitan Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar
10. Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sorong.
11. Ibu Kota Negara (IKN)
12. Pemulihan Pasca-Bencana
13. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
14. Wilayah adat Papua.
15. Pendidikan dan pelatihan vokasi industri 4.0
16. Pembangunan Science Techno Park.
17. Integrasi Pembangunan Sosial
18. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting



19. Infrastruktur TIK untuk transformasi digital
20. Jalan Tol Trans Sumatra Aceh-Lampung
21. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)
22. KA Makassar Pare-Pare
23. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
24. 18 Waduk Multiguna
25. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMs, Gardu Induk 38.000 M/A
26. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak
27. Pipa gas bumi Trans Kalimantan
28. Sistem angkutan umum massal di 6 wilayah kota metropolitan
29. Pengamanan pesisir lima kota pantura Jawa
30. Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan
31. Pemulihan 4 daerah aliran sungai kritis
32. Jembatan udara 37 rute di Papua
33. Jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan
34. Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
35. Akses air minum perpipaan 10 juta sambungan
36. Akses sanitasi limbah domestik
37. Rumah susun perkotaan 1 juta
38. Penguatan sistem peringatan dini bencana
39. Pembuatan fasilitas pengolahan limbah B3
40. Penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSRT
41. Penguatan keamanan laut Natuna

Pembangunan 2020-2024 diprioritaskan untuk membentuk struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. 41 proyek strategis akan dibagi ke dalam tujuh kelompok dengan tujuan yang beragam, mulai dari memperkuat ketahanan ekonomi hingga memperkuat infrastruktur, hingga peningkatan daya saing SDM.

4.2.2. Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan, dan Tema Pembangunan Kota Pagar Alam

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah



maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Berdasarkan hal tersebut isu strategis Tahun 2022 menjadi kondisi yang sangat penting diperhatikan dalam menyusun prioritas pembangunan Tahun 2022.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2022, perumusan ulang isu strategis perlu dilakukan untuk merespon kebijakan dalam RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023. Isu strategis RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 dinilai sangat relevan dengan kondisi terkini Kota Pagar Alam, baik faktor internal maupun eksternal. Dengan demikian, isu strategis Kota Pagar Alam yang tertuang didalam RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 meliputi:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung peningkatan IPM Kota Pagar Alam,

Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata di Kota Pagar Alam, serta Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan lockdown di berbagai daerah, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia, social distancing di tempat umum, dan pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan banyak destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.



Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu pertanian, rendahnya regerasi petani dan rendahnya akses permodalan, Petani kesulitan dalam akses pasar; Teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Kota Pagar Alam.

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dalam mendukung peningkatan Umur Harapan Hidup sebagai komponen IPM

Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

3. Peningkatan pelestarian Lingkungan yang Bersih dan Sehat

Air, udara dan tanah/lahan merupakan sumberdaya yang diperlukan oleh manusia untuk melangsungkan hidupnya. Namun disisi lain ketiga sumberdaya ini cenderung terus mengalami pencemaran/kerusakan akibat dampak negatif dari aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Status kualitas air, udara dan lahan mempengaruhi derajat kesehatan dan kesejahteraan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan pelestarian lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengolahan sampah terpadu, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal/terpusat, pencegahan pencemaran air dan udara melalui pengelolaan air limbah rumah tangga, industri dan UMKM



4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Konektivitas Daerah.

Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku. Peningkatan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di Kota Pagar Alam.

5. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Rendahnya akses dan kualitas pendidikan akan mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan di Kota Pagar Alam yang dapat dilihat dari capaian APK dan APM untuk pendidikan dasar dan menengah yang belum mencapai seratus persen. Dalam hal ini perlunya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Selain hal tersebut diatas, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dan kualitas dan relevansi, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, dan belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

6. Pengembangan Pariwisata, Budaya dan Prestasi Olahraga

Sebagai Kota wisata, pariwisata di Kota Pagar Alam menjadi penyumbang terbesar ke-tiga setelah sektor perdagangan dan pertanian terhadap PDRB. Oleh karena itu tujuannya pembangunan di bidang kepariwisataan adalah untuk menciptakan citra dan image Kota Pagar Alam menjadi kota wisata yang menarik kunjungan baik domestik maupun internasional sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kota Pagar Alam, sehubungan



dengan hal tersebut perlunya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata yang kompeten dan professional.

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga sangat mendukung terciptanya prestasi olahraga di Kota Pagar Alam, disamping itu olahraga juga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, dan disiplin.

Kota Pagar Alam mempunyai potensi cukup besar di bidang kebudayaan, hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda cagar budaya yang bernilai sejarah yang tinggi. Kebudayaan merupakan satu kesatuan di dalam pengembangan kesenian di Kota Pagar Alam, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi adat Besemah.

7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Pagar Alam masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang perlu perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur, dan belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah.

8. Pembangunan Kampus Regional IPDN di Kota Pagar Alam

Pembangunan kampus regional IPDN direncanakan akan dibangun diatas Lahan seluas 20 ha di Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Atung Bungsu yang berdekatan dengan Bandara Atung Bungsu Kota Pagar Alam. Dampak dari pembangunan kampus regional IPDN ini akan berpengaruh terhadap peningkatan IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatkan kunjungan wisata di Kota Pagar Alam serta mendukung kemajuan Provinsi Sumatera Selatan. Rencana kampus regional IPDN tersebut akan menampung praja tingkat II yang berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia, sekaligus memenuhi kebutuhan SDM daerah yang berjiwa kepamongan, profesional, dan kompeten.



Berdasarkan 8 (delapan) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema atau fokus pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022, adalah:

“REVITALISASI EKONOMI DIDUKUNG DENGAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022 merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018–2023. Adapun prioritas pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022 terdiri dari:

1. Peningkatan produktivitas pertanian, umkm, investasi dan pariwisata
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Penjelasan 4 (empat) prioritas pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022 dijabarkan terhadap Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023 dalam table berikut :



Tabel 4.3
 Penjabaran Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023
 dalam Prioritas Daerah RKPd Kota Pagalar Alam Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022			
1	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, UMKM DAN PARIWISATA	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan, perdagangan, industri	Produktivitas tanaman perkebunan kopi	Ton/Ha	2,74	Revitalisasi sektor pertanian	Optimalisasi pemanfaatan lahan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/Ha	566			
			Rata-rata Produktivitas tanaman Hortikultura	Ton/Ha	10,22			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Kelompok Tani Penerima Manfaat Penerapan Teknologi Pertanian	%	13,27			
							Menyempurnakan Kelembagaan Pertanian	Program perizinan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/Ha	5,66			
							Meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian yang profesional	Program penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok Tani Naik Kelas	%	29,88			
							Memperbaiki Teknik Bertani							
							Perbaikan dan pengembangan saluran irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Proporsi Irigasi dalam Kondisi Baik	%	52,66			
							Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Air							
							Produksi perikanan	%	95		Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pengembangan Budidaya Perikanan	%	90
											Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	%	90
							Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	19,52	Mengembangkan industri Olahan dan Kreatif berbasis	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rasio Jumlah Pasar/ 10.000 Penduduk	Angka	0,7



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
						Pertanian		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	%	88
								Program pengembangan ekspor	persentase capaian program peningkatan dan pengembangan ekspor	%	88
								Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	%	69,01
			Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	1,68			Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	%	90
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama	%	176	Menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan	Diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan yang bermutu, sehat, berbasis sumber daya dan budaya lokal, serta aman terutama dari penyakit zoonosis, dan halal	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan konsumsi pangan	%	84
							Peningkatan konsumsi protein hewani yang berasal dari ternak.				
								Program pengawasan keamanan pangan	Persentase peningkatan konsumsi pangan	%	84
		Terbangunnya pusat-pusat wisata dan memajukan budaya budaya	Budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional	Buah	2	Peningkatan pelestarian/ pengembangan seni dan budaya	Meningkatkan pembinaan pelaku seni budaya	Program pengembangan kebudayaan	penyelenggaraan festival seni dan budaya	buah	2



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	
		lokal							budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional	buah	4	
								Optimalisasi Pengelolaan cagar/warisan budaya	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	jumlah kawasan situs /cagar budaya yang terdata	buah	63
									persentase kawasan situs /cagar budaya yang dipublikasikan	%	31,75	
			Kontribusi pariwisata dalam PDRB	%	4	Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal	Pengembangan dan pembangunan pusat-pusat wisata unggulan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	%	100	
							Peningkatan kerjasama antar daerah dan pengusaha wisata dalam bidang promosi wisata dan industri wisata di tingkat provinsi dan nasional	Program pemasaran pariwisata	Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata	%	90	
							Peningkatan mutu layanan dan diversifikasi produk wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Pengembangan Kemitraan	%	100	
								Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	%	100	
		Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2	Meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran	Peningkatan Pemerataan Kualitas Pendidikan	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang Memiliki Kompetensi Keterampilan Kerja	%	65	
								Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang Bekerja	%	80	



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
								Program hubungan industrial	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Perlindungan Hukum	%	55
			Angka Kemiskinan	%	7,53		Peningkatan Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat	Program pemberdayaan sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	67
								Program rehabilitasi sosial	Proporsi sumber daya yg dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	%	82
								Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	KK	16088
							Fasilitasi Akses Permodalan tanpa bunga bagi usaha mikro dan kecil menengah	Program pemberdayaan UMKM	persentase pengembangan kewirausahaan dan keunggulan usha kecil dan menengah	%	11,39
								Program pengembangan UMKM	persentase cakupan peningkatan kelembangaan koperasi	%	1,75
2	PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Cakupan Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	0,671	Meningkatkan sistem pendidikan	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap	Program pengelolaan pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,17
							Mengintegrasikan pendidikan karakter dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan	Program pengembangan kurikulum	harapan lama sekolah	Tahun	13,14



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
							karakter				
							Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan				
							Penguatan Pendidikan Vokasi				
						Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda	Meningkatkan pembinaan olahraga dan generasi muda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	%	87
								Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	33
								Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	%	87
						Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan Ketersediaan Sumber Daya Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	26,05
		Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup)	Nilai	0,711	Peningkatan upaya promotif, preventif, dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	95
							Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Standarisasi Pelayanan Kesehatan	%	97
								Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	95



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
							Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pengembangan obat asli Indonesia	%	95
						Meningkatkan pengendalian penduduk	Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau.	Program pengendalian penduduk	TFR (Total fertility Rate)	Angka	2,18
								Rata-rata jumlah anak per keluarga	Angka	141	
								Laju pertumbuhan penduduk	%	0,9	
							Memantapkan kelembagaan Keluarga Berencana (KB) di daerah	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	27,02
								Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Angka	48,16
									Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Angka	86,67
						Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB			Angka	70,21	
						Mengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas perempuan agar bisa bersaing pada semua strata termasuk bidang politik.	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20
								Program perlindungan perempuan	Rasio KDRT	%	0,02
								Program peningkatan Kualitas keluarga	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	58,14



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
								Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase kelurahan layak anak	%	85,71
								Program pemenuhan hak anak (PHA)	Kota Layak Anak	Angka	650
								Program perlindungan khusus anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	
3	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	%	62,37	Meningkatkan infrastruktur	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan pertanian, wisata, pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi	Program penyelenggaraan jalan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	62,37
			Persentase akses rumah tangga terhadap jamban sehat dan tangki septik yang layak	%	88			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Jalan	%	62
			Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	%	69,97			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Penduduk Berakses Air Limbah	%	69,97
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	%	99,57			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses air minum	%	69,97
								Program kawasan permukiman	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	99,57
								Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase rumah tangga kumuh	%	94,14
								Program pengembangan perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	99,57
								Program Pengembangan Permukiman	Sarana Ibadah yang dibangun	%	87,76
								Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Layanan Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang baik	%	87,76
											Pengendalian Pemanfaatan tata ruang



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
							yang telah dibuat dan ditetapkan		dan kawasan strategis kota		
		Meningkatnya kinerja perhubungan dan penerapan teknologi informasi	Indeks Konektivitas	Nilai	1	Peningkatan Akses dan Manajemen Transportasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase capaian jumlah kegiatan yang memenuhi target Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	%	100
			Cakupan Layanan Telekomunikasi (Coverage) (%)	%	85	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information Communication Technology)	Perluasan Jangkauan ICT	Program informasi dan komunikasi publik Program aplikasi informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi (covrage) (%) Cakupan Layanan Telekomunikasi (covrage) (%)	% %	85 85
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,087	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan	Pengurangan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program perencanaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdiri dari : Indeks Kualitas Air, indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan lahan	%	90
								Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdiri dari : Indeks Kualitas Air, indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan lahan	%	90
								Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdiri dari : Indeks Kualitas Air, indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan lahan	%	90
								Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdiri dari : Indeks Kualitas Air, indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan lahan	%	90



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022		
								Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdiri dari : Indeks Kualitas Air, indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan lahan	%	90		
								Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup terdiri dari : Indeks Kualitas Air, indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan lahan	%	90		
								Meningkatkan pengelolaan Sampah	Program pengelolaan persampahan	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	%	87	
								peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana	pengadaan sarana prasarana peringatan dini darurat bencana serta penguatan data, informasi, dan literasi bencana	Program penanganan bencana	Persentase Perberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	lokasi	1
										Program Penanggulangan Bencana	Presentase peningkatan pengendalian kerugian infrastruktur dan pengelolaan daerah rawan bencana	%	64
										Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan Bencana	%	60
4	PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN STABILITAS KEAMANAN DAN	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Reformasi Birokrasi		BB		
								Pengembangan sistem karir dan promosi berdasarkan kompetensi	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Dokumen penataan daerah/wilayah yang disusun	%	100	



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
	KETERTIBAN MASYARAKAT						Membangun disiplin dan etos kerja	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	%	100
			Opini Pengelolaan Keuangan	Nilai	WTP	Meningkatkan manajemen pelayanan publik	Meningkatkan kualitas Pelayanan publik sesuai SOP dan SPP yang transparan, Efisien, Efektif, Akuntabel dan Inovatif	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tercapai target	%	100
			Kategori Nilai SAKIP	Nilai	A		Meningkatkan kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam APBD serta Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan pada Bidang PPM dan Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100
								Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100
								Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	97
								Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	97
								Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	97



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
								Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase terlaksananya Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	%	100
								Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Tingkat Maturitas Implementasi SPIP	Nilai	2,6
								Program Kepegawaian Daerah	Jumlah SK Jabatan struktural dan fungsional yang selesai	%	98
								Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	persentase jumlah peserta seleksi jabatan tinggi pratama yang lulus	%	98
						Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	%	90
								Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Peraturan Perundangundangan	%	97
									Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	%	4,2

Sumber: RPJMD 2018-2023



Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi diatas, dengan 10 (Sepuluh) Prioritas Bidang Pembangunan yaitu:

1. Pengembangan Industri Unggulan;
2. Perluasan pasar dan perbaikan manajemen ekonomi kerakyatan;
3. Pengembangan Perekonomian, Koperasi dan UKM berbasis Pariwisata;
4. Kebudayaan yang berkearifan lokal;
5. Pemerataan Kualitas Pendidikan;
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan;
7. Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan pengurangan kemiskinan;
8. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
9. Peningkatan Pelayanan Publik menuju Good Governance;
10. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2018-2023), mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2022, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan yang ada di dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :



Tabel 4.4
Keselarasan Kebijakan RPJMD Kota Pagalar Alam dan
Prioritas Pembangunan Kota Pagalar Alam, Provinsi Sumsel dan Nasional
Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMSEL 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2022
1. Peningkatan Produktivitas Pertanian, UMKM dan Pariwisata	1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata	2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	4. Pemerataan Pembangunan melalui Peningkatan Insfrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar
		6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Dan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	5. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik



Tabel 4.5
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah RKP 2022 dengan
Sasaran Pembangunan Nasional RKP 2022

RKP Tahun 2022				RKP Kota Pagar Alam Tahun 2022			
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022	No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022
1	Sasaran, Indikator, dan Target PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, UMKM DAN PARIWISATA			
1.1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			Meningkatnya Ketahanan Pangan			
	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	nilai	92,8		Ketersediaan pangan utama	%	176
1.2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian			Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan, perdagangan, industri			
	2.1 Rasio kewirausahaan nasional (%)	%	3,75		Jumlah Kelompok usaha baru dan wirausahaan baru		
	2.2 Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	%	3,9-4,0		Produktivitas tanaman perkebunan kopi	Ton/Ha	2,74
					Rata-rata Produktivitas tanaman Hortikultura	Ton/Ha	10,22
	2.3 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	%	8,31		Produksi perikanan	%	95
	2.4 Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1 a) (%)	%	8,31				
	2.5 Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1b) (%)	%	19,9-20,04		Kontribusi Industri terhadap PDRB	%	1,68
	2.7 Kontribusi PDB pariwisata	%	4,3		Kontribusi pariwisata dalam PDRB	%	4
	2.8 Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	juta orang	2,3-2,8				
	2.9 Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	%	5,4-6,9		Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)		
	2.12 Rasio Perpajakan Terhadap PDB (17.1.1) a) (%)	%	8,37-8,42		Rasio Pajak terhadap PDB		
					Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	19,52



RKP Tahun 2022				RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022			
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022	No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022
2	Sasaran, Indikator dan Target PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, UMKM DAN PARIWISATA		
2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)						
	1.1 Laju pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI (%/Tahun) a)	%	5,06-5,78		Laju pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI (%/Tahun)	%	5,38
	1.2 IPM KBI (nilai min-maks) b)	nilai	70,53-82,99		IPM	nilai	70,23
	1.3 Persentase Penduduk Miskin KBI	%	8,64		Persentase Penduduk Miskin	%	7,53
3	Sasaran, Indikator dan Target PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing						
1	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan						
1.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15–49 tahun)		2,21		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15–49 tahun)		
1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	%	99		Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	%	85
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk						
2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):				Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):		
2.1.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	%	87		Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan		



RKP Tahun 2022				RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022			
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022	No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022
					sosial (%)		
2.1.2	Proporsi Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	%	75		Proporsi Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)		
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan			Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Layanan Kesehatan Masyarakat			
					Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup)	Nilai	0,711
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran	205		Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran	210
3.2	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	per 1000 kelahiran	18,6		Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	per 1000 kelahiran	6,1
3.3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	18,4		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	<28
3.4	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		231		Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
3.5	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)		21,8				
3.6	Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)		8,9				
3.7	Nilai rata-rata hasil PISA:						
	3.7.1 Membaca (nilai)		394				
	3.7.2 Matematika (nilai)		385				
	3.7.3 Sains (nilai)		399				
				Meningkatnya Layanan Pendidikan			
					Indeks Pendidikan	Nilai	0,671
3.8	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	tahun	9,13		Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	tahun	9,17



RKP Tahun 2022				RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022			
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022	No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022
3.9	Harapan lama sekolah (tahun)	tahun	13,57		Harapan lama sekolah (tahun)	tahun	13,14
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda						
	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	nilai	69,87				
	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	nilai	91,3		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	nilai	93,95
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	nilai	55,61				
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan						
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	%	36				
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing				Menurunnya kemiskinan dan pengangguran		
6.1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	%	46,87		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2
6.2	Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT):						
	6.2.1 Top 200		0				
	6.2.2 Top 300		1				
	6.2.3 Top 500		2				
6.3	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	%	41,92				
6.4	Peringkat Global Innovation Index	indek	80-85				
4	Sasaran, Indikator dan Target PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya						
	Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	nilai	71,96				



RKP Tahun 2022				RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022			
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022	No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			Terbangunnya pusat-pusat wisata dan memajukan budaya budaya lokal			
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	nilai	59,71		Budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional	Buah	2
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social						
	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	nilai	0,64				
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat						
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	%	74,7				
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa						
	Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	nilai	57				
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	tahun	22				
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif						
	Nilai Budaya Literasi (nilai)	nilai	65,7				
5	Sasaran, Indikator dan Target PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA			
	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar			Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur			
	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	%	65,1		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	%	99,57
					Persentase akses rumah tangga	%	88



RKP Tahun 2022				RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022			
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022	No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022
					terhadap jamban sehat dan tangki septik yang layak		
	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	%	60				
	Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, %)	%	9				
	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	%	35		Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	%	69,97
	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar						
	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	jam/100 km	2,09		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	%	62,37
	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	%	36				
	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan				Meningkatnya kinerja perhubungan dan penerapan teknologi informasi		
	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	kota	6		Indeks Konektivitas	Nilai	1
	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan						
	Rasio Elektrifikasi (%)	%	100				
	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh/Kapita)	kWh/Kapita	1268				
	Penurunan Emisi GRK Sektor	Juta ton	91				



RKP Tahun 2022				RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022			
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022	No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022
	Energi (Juta ton)						
	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK				Meningkatnya kinerja perhubungan dan penerapan teknologi informasi		
	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%)	%	98,5		Cakupan Layanan Telekomunikasi (Coverage) (%)	%	85
6	Sasaran, Indikator dan Target PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA		
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	nilai	69,22		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74,08
	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim						
	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	%	0,91				
	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline						
	Persentase penurunan emisi GRK (%)	%	26,87				
	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	%	21,54				
7	Sasaran, Indikator dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT		
	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal						
	Indeks Demokrasi Indonesia ¹ (nilai)	nilai	77,72				
	Tingkat Kepercayaan	%	75				



RKP Tahun 2022				RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022			
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022	No	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2022
	Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah ²) (%)						
	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri						
	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional ³) (nilai)	nilai	96,3				
	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang mantap						
	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	nilai	4,29				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	Indeks Pelayanan Publik (nilai) 4)	nilai	4,29		Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB
					Opini Pengelolaan Keuangan	Nilai	WTP
					Kategori Nilai SAKIP	Nilai	A
	Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional						
	Persentase Ancaman terhadap Keselamatan Segenap Bangsa di Seluruh Wilayah NKRI yang Dapat Diatasi (%) ⁵)	%	100				



Tabel 4.6
Alokasi Anggaran Prioritas Daerah RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022

No	Prioritas RKPD Tahun 2022	Anggaran (Rp.)	Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, UMKM DAN PARIWISATA	54.456.758.451	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4.553.072.960
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	8.533.667.263
			Program perizinan usaha pertanian	25.001.000
			Program penyuluhan pertanian	534.023.540
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	20.171.843.676
			Program pengelolaan perikanan budidaya	1.658.963.967
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	332.414.795
			Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	1.222.013.500
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	111.820.000
			Program pengembangan ekspor	568.170.000
			Program standardisasi dan perlindungan konsumen	275.000.000
			Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	740.000.000
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1.281.550.550
			Program pengawasan keamanan pangan	164.799.000
			Program pengembangan kebudayaan	353.877.700
			Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	254.020.200
			Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	4.317.956.100
Program pemasaran pariwisata	3.247.035.300			



No	Prioritas RKPD Tahun 2022	Anggaran (Rp.)	Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	1.147.310.000
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	722.521.100
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	284.705.600
			Program penempatan tenaga kerja	60.000.000
			Program hubungan industrial	39.999.700
			Program pemberdayaan sosial	299.000.000
			Program rehabilitasi sosial	167.993.950
			Program perlindungan dan jaminan sosial	1.349.998.550
			Program pemberdayaan UMKM	150.000.000
			Program pengembangan UMKM	1.890.000.000
2	PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	136.781.109.930	Program pengelolaan pendidikan	56.921.648.554
			Program pengembangan kurikulum	200.281.810
			Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.439.078.410
			Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.478.126.845
			Program pengembangan kapasitas kepramukaan	500.000.000
			Program Pembinaan Perpustakaan	444.880.500
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	68.434.425.931
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	69.610.000



No	Prioritas RKPD Tahun 2022	Anggaran (Rp.)	Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	821.858.000
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	508.060.000
			Program pengendalian penduduk	250.048.150
			Program pembinaan keluarga berencana (KB)	1.462.184.980
			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	803.073.500
			Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	619.976.900
			Program perlindungan perempuan	400.000.000
			Program peningkatan kualitas keluarga	1.062.910.350
			Program pengelolaan sistem data gender dan anak	45.000.000
			Program pemenuhan hak anak (PHA)	169.946.000
			Program perlindungan khusus anak	150.000.000
3	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA	94.309.127.306	Program penyelenggaraan jalan	18.617.664.261
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1.599.995.307
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	649.908.685
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	3.359.895.695
			Program kawasan permukiman	3.750.153.200
			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas	28.477.353.415



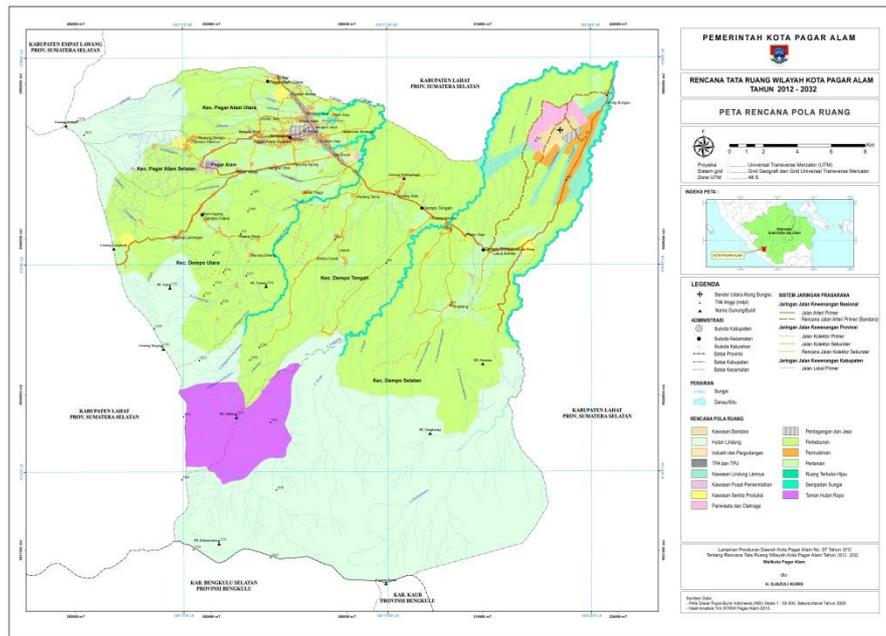
No	Prioritas RKPD Tahun 2022	Anggaran (Rp.)	Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			umum (PSU)	
			Program pengembangan perumahan	89.248.500
			Program Pengembangan Permukiman	10.066.188.170
			Program Penataan Bangunan Gedung	10.303.030.483
			Program penyelenggaraan penataan ruang	950.000.000
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	5.597.595.810
			Program informasi dan komunikasi publik	1.847.395.800
			Program aplikasi informatika	1.173.070.550
			Program perencanaan lingkungan hidup	381.480.000
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	446.213.420
			Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	105.208.000
			Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	150.000.000
			Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	38.051.000
			Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	50.000.000
			Program pengelolaan persampahan	4.989.550.500
			Program penanganan bencana	633.257.150
			Program Penanggulangan Bencana	1.363.026.720



No	Prioritas RKPD Tahun 2022	Anggaran (Rp.)	Program Prioritas RKPD Tahun 2022	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3.030.736.335
4	PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	82.378.186.327	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	42.253.669.319
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	3.476.619.558
			Program perekonomian dan pembangunan	995.216.250
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.311.026.700
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.264.525.850
			Program penelitian dan pengembangan daerah	949.998.200
			Program pengelolaan keuangan daerah	13.465.685.250
			Program pengelolaan barang milik daerah	2.949.862.600
			Program pengelolaan pendapatan daerah	4.979.993.550
			Program penyelenggaraan pengawasan	845.220.000
			Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	493.617.000
			Program Kepegawaian Daerah	3.481.418.550
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.565.137.000
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	97.000.000
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.249.196.500		
	JUMLAH	367.925.182.014		

4.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, kebijakan struktur ruang, dan kebijakan pola ruang.



Sumber : RTRW Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032

Gambar 4.2
Pola Ruang Kota Pagar Alam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012 – 2032, beberapa point dalam penentuan pembagian kawasan berdasarkan kondisi dan potensinya tiap wilayah ditampilkan Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Pembagian Pola Tata Ruang Kawasan Kota Pagar Alam

Kawasan Pertanian	Kawasan peruntukan pertanian untuk tanaman tahunan seluas kurang lebih 10.205 Ha tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Pagar Alam dan jenis tanaman yang potensial adalah kopi dan kakao. Sedangkan untuk tanaman musiman lahan yang cocok adalah pada lahan dengan kemiringan kurang dari 40 %, ketinggian kurang dari 2000 meter diatas permukaan laut dengan kedalaman efektif tanah 30
-------------------	--



cm. Kondisi ini berada di kecamatan Dempo Utara.

Kawasan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none">- Kawasan perkebunan teh yang berada di Kecamatan Pagalar Alam Selatan, Kelurahan Gunung Dempo, dengan rencana pengembangan kawasan sebesar kurang lebih 1.575 Ha.- Sedangkan kawasan perkebunan kopi tersebar hampir di seluruh Kota Pagalar Alam yaitu di Kecamatan Pagalar Alam Selatan, Kecamatan Pagalar Alam Utara, Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara
Kawasan Pengembangan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Kawasan yang memiliki potensi sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi karena memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi yang baik.- Kawasan ini berada di koridor Jalan Arteri Sekunder yang berada di Pusat Kota (Kecamatan Pagalar Alam Utara dan Kecamatan Pagalar Alam Selatan) dengan rencana pengembangan koridor sepanjang kurang lebih 21.766 m.
Kawasan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none">- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.- Kawasan dipusatkan di Desa Nendagung kecamatan Pagalar Alam Selatan dan sub pusat yang tersebar di seluruh wilayah kota Pagalar Alam dengan luas kurang lebih 100 ha.
	-
Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">- Kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata alam, budaya, buatan, ekologis dan spiritual.- Kawasan wisata alam Gunung Dempo, perkebunan teh dan cughup (air terjun);- Kawasan wisata budaya rumah batu talang tinggi dan cagar budaya megalith yang tersebar di wilayah Kota Pagalar Alam;- Kawasan wisata buatan berupa bangunan rumah Basemah yang tersebar di wilayah Kota Pagalar Alam;- Wisata ekologis pada kawasan hutan di Kota Pagalar Alam; dan- Wisata spiritual di Kecamatan Dempo Selatan dan Kecamatan Dempo Tengah.
Kawasan Pemukiman Perumahan	<ul style="list-style-type: none">- Kawasan perumahan dan permukiman yang dikembangkan di Kota Pagalar Alam meliputi perumahan yang dikembangkan melalui pembangunan perumahan formal, perumahan swadaya dan



permukiman talang dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah

- Kawasan peruntukan perumahan permukiman kepadatan tinggi ditetapkan di Kecamatan Pagar Alam Utara dan Kecamatan Pagar Alam Selatan
- Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang dan rendah ditetapkan di Kecamatan Dempo Selatan, Dempo Tengah dan Dempo Utara.

-
- | | |
|---------------------------------------|--|
| Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi | - Untuk untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi agar potensinya cepat tumbuh memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di kecamatan Nendagung Pagar Alam selatan sebagai kawasan cepat tumbuh |
| | - Untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal kota, pemerintah Kota pagar Alam menetapkan kawasan strategis pertumbuhan kota di sekitar lapangan terbang yang berlokasi di Kecamatan Dempo Selatan, Kelurahan Atung Bungsu, Dusun Mingkik, Dusun Benua Keling Dusun Tanah Pilih, dan Dusun Suka Cinta, dengan rencana pengembangan kawasan sebesar kurang lebih 500 Ha. |

Sumber : Perda No.07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam tahun 2012 – 2032

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Pagar Alam diwujudkan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya. WP mengacu pada skenario pengembangan wilayah sesuai target pencapaian penataan ruang dan arah pengembangan ekonomi. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan, sesuai dengan sektor unggulan dan fokus pengembangan masing-masing wilayah.

Efektifitas pengembangan wilayah didorong oleh pembangunan dan peningkatan jaringan prasarana wilayah yang mendukung fungsi masing-masing kawasan.

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang, meliputi:

- a. Pemantapan peran perkotaan sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu PKN, PKW, dan PKL;
- b. Pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan dayadukung dan



- dayatampung serta fungsi kegiatan dominannya;
- c. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan serta wilayah yang berada di sekelilingnya untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan;
 - d. Pengendalian perkembangan sistem kota dengan tidak melebihi dayadukung dan dayatampungnya;
 - e. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk mewujudkan sistem kota di Daerah; dan
 - f. Mendorong terlaksananya peran RTRW dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung, dan pengembangan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

- a. Pencapaian luas kawasan lindung; dan
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

- a. Mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan luas kawasan hutan, serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah dan nasional;
- b. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Mengutamakan pembangunan hunian vertikal pada kawasan permukiman perkotaan guna optimalisasi dan efisiensi Ruang budidaya yang semakin terbatas, terutama pada kawasan yang perlu dikendalikan; dan
- d. Mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan.



Efektifitas pengembangan wilayah didorong melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung fungsi masing-masing kawasan.

Kawasan lindung dan budidaya tercantum dalam peta Pola Ruang RTRW Kota Pagalar Alam Tahun 2012-2032 yang menampilkan dominasi ruang dalam skala peta kota. Kawasan lindung berupa deliniasi kawasan lindung hutan (hutan lindung, dan hutan konservasi), serta kawasan lindung non hutan (kawasan resapan air, kawasan perlindungan geologi, kawasan rawan bencana). Sedangkan kawasan budidaya yang tercantum dalam peta pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, simbol kawasan industri, kawasan permukiman, simbol kawasan hankam (kawasan peruntukan lainnya diatur dalam pasal). kawasan berfungsi lindung merupakan informasi yang penting dalam pemanfaatan ruang/pembangunan di kawasan budidaya, karena pembangunan harus dilaksanakan sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung, dan pengembangan kawasan budidaya.

Kawasan lindung dan budidaya tercantum dalam peta Pola Ruang RTRW Kota Pagalar Alam Tahun 2012-2032 yang menampilkan dominasi ruang dalam skala peta kota. Kawasan lindung berupa deliniasi kawasan lindung hutan (hutan lindung, dan hutan konservasi), serta kawasan lindung non hutan (kawasan resapan air, kawasan perlindungan geologi, kawasan rawan bencana). Sedangkan kawasan budidaya yang tercantum dalam peta pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, simbol kawasan industri, kawasan permukiman, simbol kawasan hankam (kawasan peruntukan lainnya diatur dalam pasal). kawasan berfungsi lindung merupakan informasi yang penting dalam pemanfaatan ruang/pembangunan di kawasan budidaya, karena pembangunan harus dilaksanakan sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022 memuat rencana kerja dan pendanaan daerah, yang disajikan melalui program dan kegiatan Tahun 2022 dan dirinci kedalam 2 (dua) subbab, yaitu: (1) penambahan dan pengurangan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2022; dan (2) rencana kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

5.1. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

Pada Perubahan RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2022 tidak dilakukan pengurangan dan/atau penambahan program dan/atau kegiatan baru terhadap APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022. Adapun perubahan yang dilakukan berupa: 1) penambahan/pengurangan anggaran, dan 2) keluaran (output) kegiatan.

Beberapa hal penting yang menjadi alasan perubahan program dan/atau kegiatan RKPD Tahun 2022, secara umum diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian dengan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 khususnya untuk pelaksanaan Tahun 2022 sebagai tahun keempat. Pembangunan diarahkan untuk mencapai visi dan misi serta program unggulan daerah terutama yang mendukung 10 (Sepuluh) prioritas pembangunan Kota Pagar Alam.
- 2) Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 khususnya triwulan II. Terdapat hal-hal yang mendasar baik secara teknis maupun administratif yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sebagaimana rencana sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sulit diprediksi dalam RKPD Tahun 2022 sehingga mengakibatkan munculnya kegiatan baru di APBD Tahun 2022. Selanjutnya, pada perubahan RKPD Tahun 2022 hanya melanjutkan atau melaksanakan kegiatan di APBD Tahun 2022.



Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 5.1, terdapat Subkegiatan Tahun 2022 yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan maupun pengurangan dari RKPD Tahun 2022 ke Perubahan RKPD Tahun 2022. Dari sisi anggaran terdapat defisit sebesar Rp. 129,605,736,270.

Selanjutnya, rekapitulasi program dan kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2022 ditungkan dalam tabel berikut.



Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Per OPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPd Perubahan Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2022			RANCANGAN AKHIR RKPd PERUBAHAN 2022			APBD 2022	RKPd PERUBAHAN 2022	BERTAMBAH / BERKURANG
		PROG	KEG	SUB	PROG	KEG	SUB			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	17	90	6	18	96	152,423,859,090	166,672,285,715	14,248,426,625
2	Dinas Kesehatan	5	19	65	5	19	65	67,214,538,377	73,678,073,720	6,463,535,343
3	Rumah Sakit Umum Daerah Besemah	2	8	18	2	10	23	86,219,044,101	82,067,299,588	(4,151,744,513)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	81	10	19	81	78,882,597,305	207,401,327,598	128,518,730,293
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10	18	42	11	19	44	33,654,517,053	53,607,289,585	19,952,772,532
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	33	2	10	35	8,393,591,463	9,438,221,713	1,044,630,250
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	10	32	3	12	43	4,373,372,892	6,131,283,828	1,757,910,936
8	Dinas Sosial	6	12	31	6	13	34	4,110,276,158	4,600,126,628	489,850,470
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	19	47	8	19	47	7,917,527,244	9,027,963,626	1,110,436,382
10	Dinas Lingkungan Hidup	9	18	50	9	18	50	9,158,396,485	9,663,396,485	505,000,000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	11	27	5	11	27	3,012,199,282	3,652,242,492	640,043,210
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	27	77	10	27	77	8,900,649,553	9,351,731,899	451,082,346
13	Dinas Perhubungan	2	18	55	2	18	56	9,924,746,736	15,129,314,223	5,204,567,487
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	12	41	5	12	41	4,971,499,318	6,234,188,560	1,262,689,242
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8	15	41	8	15	41	6,113,208,638	7,235,249,041	1,122,040,403
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	13	37	4	13	37	5,277,478,965	7,257,010,285	1,979,531,320
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	11	35	3	11	36	3,164,285,790	3,394,563,790	230,278,000



NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2022			RANCANGAN AKHIR RKPD PERUBAHAN 2022			APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	BERTAMBAH / BERKURANG
18	Dinas Pariwisata	5	16	56	5	16	56	7,348,752,707	11,785,407,187	4,436,654,480
19	Dinas Pertanian	6	18	44	6	18	45	20,339,280,216	23,096,032,925	2,756,752,709
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12	19	40	12	19	40	6,999,483,534	8,374,921,784	1,375,438,250
21	Sekretariat Daerah	3	20	65	3	20	65	41,154,041,284	49,835,114,013	8,681,072,729
22	Sekretariat DPRD	2	19	78	2	19	81	53,560,128,376	66,095,890,676	12,535,762,300
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	16	61	4	16	62	10,616,184,028	12,387,017,511	1,770,833,483
24	Badan Keuangan Daerah	4	14	78	4	14	78	71,251,286,379	50,617,808,559	(20,633,477,820)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	11	42	3	11	44	12,538,243,787	13,418,111,168	879,867,381
26	Inspektorat Daerah	3	9	31	3	10	33	5,927,040,591	7,767,561,778	1,840,521,187
27	Kecamatan Pagar Alam Utara	5	12	28	5	13	31	8,633,870,100	9,106,370,100	472,500,000
28	Kecamatan Pagar Alam Selatan	5	10	28	5	13	33	7,143,027,354	7,767,347,354	624,320,000
29	Kecamatan Dempo Utara	4	12	27	4	14	32	5,501,995,022	5,899,495,022	397,500,000
30	Kecamatan Dempo Tengah	4	11	26	4	13	29	4,145,558,100	4,512,058,100	366,500,000
31	Kecamatan Dempo Selatan	4	12	31	5	14	34	3,875,671,764	4,338,363,764	462,692,000
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	39	6	12	39	3,930,125,684	4,230,125,684	300,000,000
	TOTAL	168	468	1476	170	486	1535	756,676,477,376	953,773,194,401	197,096,717,025

Sumber: <https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/>



Tabel 5.2
Rekapitulasi Anggaran Per Urusan/Bidang Urusan dalam RKPD Perubahan Tahun 2022

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	APBD 2022			RANCANGAN AKHIR RKPD PERUBAHAN 2022			APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	BERTAMBAH / BERKURANG
		PROG	KEG	SUB	PROG	KEG	SUB			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33	90	347	33	93	370	434,402,675,249	600,452,862,610	166,050,187,361
1.01	PENDIDIKAN	3	12	83	3	13	89	152,119,787,950	164,594,062,475	12,474,274,525
1.02	KESEHATAN	5	20	69	5	20	73	153,433,582,478	155,745,373,308	2,311,790,830
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	19	82	10	19	82	78,882,597,305	207,401,327,598	128,518,730,293
1.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	13	35	5	13	36	32,989,711,303	52,542,467,060	19,552,755,757
1.05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	14	47	4	15	56	12,866,720,055	15,569,505,541	2,702,785,486
1.06	SOSIAL	6	12	31	6	13	34	4,110,276,158	4,600,126,628	489,850,470
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	62	150	414	63	151	417	57,458,070,735	71,887,664,119	14,429,593,384
2.07	TENAGA KERJA	3	4	4	3	4	4	-	366,089,007	366,089,007
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	12	18	6	12	18	2,261,840,685	2,261,708,785	(131,900)
2.09	PANGAN	5	12	33	5	12	33	5,042,284,778	5,102,721,579	60,436,801
2.1	PERTANAHAN	3	3	5	4	4	6	565,050,050	1,064,822,525	499,772,475
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	9	18	50	9	18	50	9,158,396,485	9,663,396,485	505,000,000
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	11	27	5	11	27	3,012,199,282	3,652,242,492	640,043,210



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	APBD 2022			RANCANGAN AKHIR RKPD PERUBAHAN 2022			APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	BERTAMBAH / BERKURANG
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	15	59	4	15	59	6,638,808,868	7,090,023,114	451,214,246
2.15	PERHUBUNGAN	2	18	55	2	18	56	9,924,746,736	15,129,314,223	5,204,567,487
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	9	35	3	9	35	4,884,476,318	6,147,165,778	1,262,689,460
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5	5	6	5	5	6	1,024,200,000	1,724,200,000	700,000,000
2.18	PENANAMAN MODAL	5	11	37	5	11	37	6,113,208,638	6,869,160,034	755,951,396
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	13	37	4	13	37	5,277,478,965	7,257,010,285	1,979,531,320
2.2	STATISTIK	1	1	3	1	1	3	77,971,000	77,970,782	(218)
2.21	PERSANDIAN	1	2	3	1	2	3	9,052,000	9,052,000	-
2.22	KEBUDAYAAN	3	5	7	3	5	7	304,071,140	2,078,223,240	1,774,152,100
2.23	PERPUSTAKAAN	2	8	31	2	8	32	2,988,725,240	3,219,003,240	230,278,000
2.24	KEARSIPAN	1	3	4	1	3	4	175,560,550	175,560,550	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21	55	148	21	55	149	36,538,558,923	45,457,403,943	8,918,845,020
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	7	14	3	7	14	2,875,242,466	3,925,242,047	1,049,999,581
3.26	PARIWISATA	5	16	56	5	16	56	7,348,752,707	11,785,407,187	4,436,654,480
3.27	PERTANIAN	6	18	44	6	18	45	20,339,280,216	23,096,032,925	2,756,752,709
3.3	PERDAGANGAN	4	5	9	4	5	9	1,227,588,000	1,233,228,000	5,640,000
3.31	PERINDUSTRIAN	3	9	25	3	9	25	4,747,695,534	5,417,493,784	669,798,250
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	5	39	143	5	39	146	94,714,169,660	115,931,004,689	21,216,835,029
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	3	20	65	3	20	65	41,154,041,284	49,835,114,013	8,681,072,729
4.02	SEKRETARIAT DPRD	2	19	78	2	19	81	53,560,128,376	66,095,890,676	12,535,762,300
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	11	41	181	11	41	184	94,405,714,194	76,422,937,238	(17,982,776,956)
5.01	PERENCANAAN	3	13	55	3	13	55	9,666,186,478	10,881,187,961	1,215,001,483
5.02	KEUANGAN	4	14	78	4	14	78	71,251,286,379	50,617,808,559	(20,633,477,820)
5.03	KEPEGAWAIAN	2	10	39	2	10	41	8,615,405,787	9,414,814,168	799,408,381
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	3	1	1	3	3,922,838,000	4,003,297,000	80,459,000



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	APBD 2022			RANCANGAN AKHIR RKPD PERUBAHAN 2022			APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022	BERTAMBAH / BERKURANG
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	3	6	1	3	7	949,997,550	1,505,829,550	555,832,000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	9	31	3	10	33	5,927,040,591	7,767,561,778	1,840,521,187
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	3	9	31	3	10	33	5,927,040,591	7,767,561,778	1,840,521,187
7	UNSUR KEWILAYAHAN	5	13	37	5	15	41	29,300,122,340	31,623,634,340	2,323,512,000
7.01	KECAMATAN	5	13	37	5	15	41	29,300,122,340	31,623,634,340	2,323,512,000
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	12	39	6	12	39	3,930,125,684	4,230,125,684	300,000,000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	39	6	12	39	3,930,125,684	4,230,125,684	300,000,000
	TOTAL	146	409	1340	147	416	1379	756,676,477,376	953,773,194,401	197,096,717,025

Sumber : <https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/>



5.2. Pendanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 membutuhkan dukungan pendanaan. Pada Perubahan RKPD Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota Pagalar Alam melakukan analisis kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk pemuktahiran dari analisis yang telah dilakukan pada RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi dan anggaran daerah pada Perubahan RKPD Kota Pagalar Alam Tahun 2022 disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
STRUKTUR APBD KOTA PAGAR ALAM
DALAM RKPD PERUBAHAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

NO	URAIAN	APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	51,896,297,500	59,568,779,587
4.1.01	Pajak Daerah	8,592,500,000	8,903,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	4,398,397,500	4,408,897,500
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5,880,000,000	7,295,652,639
4.1.04	Lain-Lain PAD yang sah	33,025,400,000	38,961,229,448
4.2	Pendapatan Transfer	669,162,537,528	761,732,985,209
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	617,161,596,000	649,503,756,156
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar daerah	52,000,941,528	112,229,229,053
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	4,006,000,000	4,006,000,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	4,006,000,000	4,006,000,000
	Jumlah Pendapatan	725,064,835,028	825,307,764,796
5	BELANJA		
5.1	Belanja Operasi	578,329,242,605	650,206,670,318
5.1.01	Belanja Pegawai	324,590,711,570	325,049,955,459
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244,923,750,561	312,224,286,898
5.1.04	Belanja Subsidi	500,000,000	1,200,000,000
5.1.05	Belanja Hibah	8,314,780,474	11,632,427,961
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	100,000,000



NO	URAIAN	APBD 2022	RKPD PERUBAHAN 2022
5.2	Belanja Modal	148,697,234,771	298,916,524,083
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,630,011,307	44,709,038,357
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33,400,878,453	50,616,351,731
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	67,307,895,511	199,510,421,895
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,758,449,500	4,080,712,100
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	1,600,000,000	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29,650,000,000	4,650,000,000
5.3	Belanja Tidak Terduga	29,650,000,000	4,650,000,000
	Jumlah Belanja	756,676,477,376	953,773,194,401
	Total Surplus / (Defisit)	(31,611,642,348)	(128,465,429,605)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31,611,642,348	112,078,572,760
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31,611,642,348	112,078,572,760
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31,611,642,348	112,078,572,760
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	1,000,000,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1,000,000,000
	Pembiayaan Netto	31,611,642,348	111,078,572,760
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	(17,386,856,845)
	TOTAL APBD	756,676,477,376	937,386,337,556

Sumber : <https://pagaralam.sipd.kemendagri.go.id/>



BAB VI PENUTUP

RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022 disusun untuk meningkatkan percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023. Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam pengajuan usulan RKPD Perubahan Tahun 2022. Penentuan prioritas program dan kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 pada Triwulan II.

RKPD Perubahan Tahun 2022 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, RKPD Perubahan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus segera dibuat setelah RKPD Perubahan ini ditetapkan.

Dalam RKPD Perubahan Tahun 2022, memuat program dan kegiatan tahun 2022, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2022, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022, Walikota Pagar Alam menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan harapan target pembangunan pada tahun 2022 dapat tercapai.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

ALPIAN MASKONI